Edisi Oktober 2025, Volume 22 No. 10

ISSN : 1411-9196

Newsletter Pusdatin

Daftar Isi

- Kementan Perkuat Sinergi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional pada Rakornas BSSN 2025
- Sinergi Data Pertanian dan Perikanan: Pusdatin Kementan Dukung Integrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Halaman 3
- SPLP: Jembatan Interoperabilitas Antar Layanan Pertanian, Halaman 5
- Partisipasi Pusdatin Pada *The Regional Workshop on Rice Growing Outlook* (RGO) *and Maize Growing Outlook* (MGO) Lingkup ASEAN, Halaman 6
- Pusdatin dan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Dukung Dinas Pertanian DI Yogyakarta dalam Pembaruan Data Lahan Baku Sawah, Halaman 7
- Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Tantangan yang Terus Dihadapi, Halaman 9
- Kenapa Semua Negara 'Ngotot' Soal Data Berkualitas?, Halaman 11

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan

SCAN ME

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian

bit.ly/surveipusdatin

Kementan Perkuat Sinergi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional pada Rakornas BSSN 2025

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) Tahun 2025 pada Selasa (23/09/2025). Acara strategis yang mengusung tema "Bersinergi Memetakan Interdependensi dalam Rangka Memperkuat Keamanan Siber Infrastruktur Informasi Vital Nasional" ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi bersama menghadapi ancaman siber yang semakin dinamis dan terorganisir, yang dapat menimbulkan dampak sistemik lintas sektor jika tidak ditangani secara serius.

Latarbelakangpenyelenggaraanrakornasinididasarkan pada pesatnya transformasi digital yang membuat ketergantungan terhadap sistem teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang tidak terhindarkan, terutama bagi sektor-sektor penyelenggara layanan publik strategis dan vital. Interdependensi antar sektor dalam ekosistem Infrastruktur Informasi Vital (IIV) merupakan faktor fundamental yang menentukan tingkat kerentanan dan potensi dampak sistemik suatu insiden siber. Ketergantungan ini menciptakan risiko berantai *(cascading risk)*, di mana gangguan pada satu sektor dapat menyebabkan disrupsi layanan pada sektor lainnya.

Dalam forum nasional ini, Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen kuat melalui kehadiran delegasi berkompeten yang dipimpin langsung oleh Intan Rahayu selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin), didampingi Yenni Tat selaku Ketua Tim Kerja Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran mereka tidak hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi

Tim Redaksi

Penanggung Jawab:
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Redaktur:
Kepala Bagian Umum

Editor:
Roydatul Zikria, S.Si., M.S.E
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom., MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Suyati, S.Kom
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Lilik Wulaningtyas, S.Kom

Fotografer:
Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis:
Dhanang Susatyo, SE
Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat:
Rizky Purnama R, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Rahma Andany, S.Kom
Yusri Ardi, S.Kom
Marwati
Priatna Sari

Alamat Redaksi

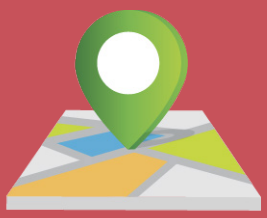

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV, Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 7822638
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

merupakan implementasi nyata dari komitmen level pimpinan yang sebelumnya telah ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam Rakornas IIV April 2025 lalu.

Kapusdatin Kementan (tengah) bersama peserta Rakornas dari Kementerian Komdigi

Rakornas menghasilkan sepuluh poin kesepakatan krusial yang akan menjadi panduan aksi kolektif. Salah satu hasil terpenting adalah komitmen bersama untuk menyusun peta saling ketergantungan (interdependensi) antar sektor secara berkala. Pemetaan ini dinilai *essential* untuk mengidentifikasi konektivitas kritis, menilai potensi dampak lintas sektor, serta membangun skenario mitigasi yang lebih terukur dan terkoordinir. Hasil *assessment* awal mengungkap bahwa sektor TIK dan Keuangan merupakan sektor paling kritis di tingkat nasional, sementara infrastruktur terkait pengelolaan data pribadi, transaksi keuangan, penyediaan energi, dan penyaluran pangan masuk dalam daftar layanan vital yang memerlukan perlindungan maksimal.

Merespon temuan tersebut, para peserta bersepakat untuk segera menyusun strategi mitigasi ancaman siber yang konkret. Strategi ini akan mencakup penerapan standar keamanan, mekanisme audit kepatuhan, sistem redundansi, *backup system,* dan mekanisme darurat lainnya untuk memastikan kelangsungan layanan kritis. Sebagai contoh implementasi, Kementerian Perhubungan telah memelopori dengan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman teknis bagi sektor transportasi.

Rakornas juga menekankan pentingnya

pengembangan tata kelola koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pembina Sektor, Penyelenggara IIV, dan pemangku kepentingan lainnya. Model kolaborasi publik-swasta yang telah sukses diimplementasikan sektor keuangan dapat menjadi *best practice* untuk sektor lainnya. Mekanisme pertukaran informasi intelijen siber yang efektif menjadi kunci dalam mendukung respons dini dan mitigasi insiden siber.

Dari sisi implementasi, para penyelenggara IIV mengungkapkan beberapa kebutuhan mendesak, termasuk perlunya identifikasi IIV yang lebih menyeluruh di setiap sektor, dukungan anggaran khusus untuk program perlindungan IIV, serta penyusunan standar atau pedoman keamanan siber yang spesifik sesuai karakteristik masing-masing sektor. Kebutuhan regulasi turunan dari Perpres 82/2022 juga disampaikan, khususnya untuk sektor pertahanan dan transportasi yang memerlukan payung hukum lebih detail, terutama terkait tata kelola pelindungan pada lingkup teknologi informasi dan teknologi operasional.

Menanggapi hasil rakornas, Intan Rahayu menyatakan, "Pemahaman mendalam tentang interdependensi antar sektor merupakan kunci membangun ketahanan siber sektor pangan. Dengan memetakan keterkaitan kita dengan sektor energi, TIK, dan transportasi, serta memahami potensi dampak sistemik, kita dapat menyusun strategi perlindungan yang lebih terukur dan efektif".

Pendapat tersebut diperkuat oleh Yenni Tat yang menekankan, "Aspek perlindungan data pribadi dalam rantai pasok pangan merupakan komponen kritis yang tidak terpisahkan dari keamanan siber. Temuan rakornas yang menempatkan pengelolaan data pribadi sebagai layanan vital nasional semakin menguatkan urgensi program kerja tim kami".

Dengan ditetapkannya kesepakatan-kesepakatan strategis ini, Rakornas PIIV 2025 diharapkan menjadi katalisator percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. BSSN sebagai koordinator PIIV bersama kementerian/lembaga pembina sektor IIV berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi rakornas dengan program kerja nyata dan terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, dan pada akhirnya meningkatkan ketahanan siber Indonesia melalui pendekatan kolektif, berbasis risiko, dan berorientasi pada keberlanjutan operasional lintas sektor.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

Sinergi Data Pertanian dan Perikanan: Pusdatin Kementan Dukung Integrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama kementerian dan lembaga terkait menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) “Penyelarasan Proses Bisnis Penyaluran Pupuk Bersubsidi” pada 22–24 September 2025 di Gedung Graha Phonska, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian.

FGD tersebut menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam rencana perluasan kebijakan pupuk bersubsidi ke sektor perikanan. Saat ini rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata kelola pupuk bersubsidi tengah diharmonisasi dan menuntut keselarasan dengan mekanisme yang sudah berjalan di sektor pertanian.

Sinkronisasi ini penting agar implementasi kebijakan baru dapat berlangsung efektif tanpa menimbulkan gejolak di lapangan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah lintas sektor menghadapi rencana perluasan kebijakan pupuk bersubsidi ke sektor perikanan. Sinkronisasi regulasi dan mekanisme antara sektor pertanian dan perikanan diharapkan menciptakan proses penyaluran yang efisien dan berkeadilan.

Di sektor pertanian, proses telah berbasis pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), sementara di sektor perikanan sedang dikembangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pembudidaya Ikan (RDKKP).

Melalui Permentan 15/2025, keduanya akan terhubung dalam aplikasi i-Pubers sehingga data penerima bantuan pupuk dapat diverifikasi lintas sektor secara menyeluruh dan akurat.

Untuk mendukung integritas data, KKP berencana membentuk *task force* khusus yang bertugas memastikan kualitas data pembudidaya sejak awal. Dengan demikian, proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Dalam forum ini, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) selaku perwakilan dari Kementan menegaskan peran strategisnya sebagai pengelola utama sistem data pertanian. Pengalaman panjang dalam pengembangan dan pengelolaan sistem e-RDKK menjadikan Pusdatin rujukan dalam penyusunan standar data penerima pupuk bersubsidi. Melalui dukungan Pusdatin, struktur data—mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas kelompok, hingga alokasi pupuk per kios—dapat disatukan dalam satu sistem nasional yang utuh dan terintegrasi. Pusdatin juga mendorong digitalisasi dan interoperabilitas data, memastikan proses penyaluran pupuk lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi.

FGD yang berlangsung selama tiga hari tersebut membahas tiga aspek besar: perencanaan, penyaluran, dan penagihan pupuk bersubsidi. Selain menghasilkan kesepahaman teknis, FGD ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor berbasis data.

Sinergi antara Kementan, KKP, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperkuat tata kelola subsidi pupuk nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perikanan.

Bagi Pusdatin Kementan, keterlibatan dalam forum ini mempertegas posisi sebagai penjaga integritas data pertanian dan mitra kunci dalam integrasi lintas sektor. Peran ini semakin penting di tengah upaya pemerintah memastikan program subsidi benar-benar tepat sasaran, baik bagi petani maupun pembudidaya ikan.

Pelaksanaan FGD Penyelarasan Proses Bisnis Pupuk Bersubsidi di Gedung Graha Phonska, Jakarta

Penulis : Lilik Wulaningtyas

SPLP: Jembatan Interoperabilitas Antar Layanan Pertanian

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang terpadu, Kementerian Pertanian melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) terus berkomitmen memperkuat konektivitas dan interoperabilitas antar sistem informasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebuah inisiatif penting dalam mendukung integrasi digital lintas unit kerja dan layanan publik pertanian.

SPLP merupakan inisiatif nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini berfungsi sebagai middleware atau penghubung antar layanan digital pemerintahan agar dapat saling berinteraksi secara aman, efisien, dan terstandar.

Bagi Kementerian Pertanian, SPLP berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai

Melalui SPLP, pertukaran data dapat dilakukan secara otomatis dan terverifikasi, tanpa proses manual yang berulang. Hasilnya, efisiensi meningkat, akurasi data terjaga, dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data.

Bayangkan SPLP sebagai “jalan tol data” antar aplikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan adanya jalan tol ini, berbagai sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri kini dapat terhubung dengan lancar. Data dari aplikasi perencanaan, keuangan, hingga kinerja dapat saling terbaca tanpa perlu input ulang.

SPLP dibangun dengan prinsip interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem yang berbeda untuk “berbicara” dalam bahasa yang sama. Masing-masing aplikasi yang terhubung dilengkapi dengan *Application Programming Interface* (API), pintu komunikasi digital yang memastikan data berpindah dengan aman, terstruktur, dan sesuai izin yang ditetapkan.

Untuk menjamin keandalan sistem, Komdigi juga mengimplementasikan Grafana, sebuah alat *monitoring* visual yang menampilkan lalu lintas data dan status koneksi antar layanan secara yang dapat digunakan oleh Pusdatin. Dengan dukungan ini, tim teknis dapat memantau performa sistem, mendeteksi gangguan lebih cepat, serta menjaga agar layanan digital tetap stabil dan responsif.

Sebagai *data center* dan pengelola infrastruktur TIK Kementerian Pertanian, Pusdatin memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengelolaan SPLP. Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain menyusun arsitektur dan desain teknis SPLP sesuai panduan interoperabilitas nasional yang ditetapkan oleh Komdigi. Kemudian, menyediakan infrastruktur server dan jaringan yang menjamin keamanan dan ketersediaan layanan secara berkelanjutan. Juga melakukan integrasi bertahap dengan aplikasi utama Kementerian Pertanian, seperti eBudgeting, eSAKIP, dan Sistem Informasi Kinerja, guna memastikan keterpaduan antar proses bisnis digital. Selain itu menerapkan sistem *monitoring* berbasis Grafana untuk memantau performa dan trafik pertukaran data secara *real time.* Tidak lupa berkoordinasi lintas unit kerja untuk standarisasi data, metadata, serta menyusun SOP penggunaan SPLP. Dengan tahapan tersebut, SPLP menjadi fondasi bagi ekosistem data pertanian yang terintegrasi, di mana setiap unit kerja tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkoneksi dalam satu sistem yang solid dan efisien.

Implementasi SPLP juga membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di sektor pertanian. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, mengurangi duplikasi data dan proses manual antar aplikasi, memperkuat kolaborasi antar unit kerja melalui integrasi sistem informasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data *(data-driven decision making)* untuk kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembentukan ekosistem digital pertanian nasional yang terhubung lintas sektor dan lembaga.

Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan SPBE Nasional yang menekankan interoperabilitas, efisiensi, dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Ke depan, SPLP diharapkan tidak hanya menjadi penghubung di internal Kementan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam jaringan pertukaran data antar instansi yang mendukung Pemerintahan Digital Indonesia.

SPLP bukan sekadar sistem penghubung, melainkan wujud nyata inovasi, keterbukaan, dan sinergi digital di sektor pertanian. Melalui pengelolaan yang berkesinambungan oleh Pusdatin, SPLP diharapkan mampu menjadi jembatan utama antar layanan pertanian, memperkuat ketahanan data nasional, serta membawa Kementerian Pertanian menuju layanan publik yang semakin terhubung, efisien, dan modern. Dengan SPLP, kita tidak hanya membangun teknologi, kita membangun masa depan pertanian digital Indonesia.

Penulis : Lilik Wulaningtyas

Partisipasi Pusdatin Pada *The Regional Workshop on Rice Growing Outlook* (RGO) *and Maize Growing Outlook* (MGO) Lingkup ASEAN

Pertemuan *The Regional Workshop on Rice Growing Outlook* (RGO) *and Maize Growing Outlook* (MGO) *Preparation Guideline under the Project for Strengthening ASEAN Food Security Information System Function for Emergency* (SAFER Project) dilaksanakan pada tanggal 09-12 September 2025 di Bangkok, Thailand. Perwakilan dari Indonesia dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Intan Rahayu dan statistisi madya Pusdatin Takariyana Heni Astuti.

Foto Bersama Peserta The Regional Workshop on Rice Growing Outlook (RGO) and Maize Growing Outlook (MGO) Preparation Guideline under the Project for Strengthening ASEAN Food Security Information System Function for Emergency (SAFER Project)

Pertemuan ini membahas dan mengevaluasi metode pemantauan kondisi pertumbuhan padi menggunakan data agrometeorologi satelit untuk penulis/calon penulis laporan RGO dari sembilan negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memfinalisasi komoditas jagung (maize) sebagai komoditas tambahan yang akan dibuat laporan perkembangan tanamannya sebagaimana komoditas padi yaitu dengan menggunakan data/informasi agrometeorologi satelit. Laporan MGO disusun oleh delapan negara anggota yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan laporan pertumbuhan padi yang sudah di rilis sebagai output kegiatan *ASEAN Food Security Information System* (AFSIS), dinyatakan bahwa padi merupakan salah satu tanaman pangan pokok utama, yang lebih dari seperempat produksi padi/beras global diproduksi di Asia Tenggara (ASEAN). Produksi beras mempengaruhi status ekonomi negara sebagai makanan pokok dan makanan komersial. Berbagai organisasi dan perusahaan tertarik pada kondisi pertumbuhan padi suatu negara saat ini. Oleh karena itu, menerbitkan laporan kondisi pertumbuhan padi (RGO) yang benar adalah penting. Kegiatan RGO dimulai pada tahun 2013 didukung oleh JAXA/RESTEC *(Remote Sensing Technology Center of Japan).* Saat ini, tujuh Negara Anggota ASEAN (AMS) yaitu, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam berpartisipasi dalam kegiatan RGO. Mulai Januari 2023, aktivitas RGO telah dialihkan ke AFSIS di bawah proyek Space Applications for Environment (SAFE). Dua negara tambahan yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia mulai berpartisipasi pada pelaporan RGO bulan Oktober 2023.

Hasil dari pertemuan ini fokus kepada dua tujuan yaitu (1) memfinalisasi tambahan komoditas yang dicakup pada laporan perkembangan tanaman sebagai output kegiatan AFSIS; dan (2) mempelajari metode pemantauan kondisi pertumbuhan tanaman jagung. Tindak lanjut dari pertemuan ini, perwakilan Indonesia akan menyerahkan data antara lain: (1) luas tanam dan luas panen jagung bulanan yang akan digunakan dalam penyusunan kalender tanam tanaman jagung Indonesia; (2) Sebaran luas panen dan produksi komoditas jagung (sentra produksi jagung) di Indonesia yang akan digunakan untuk fokus pengamatan daerah tersebut terhadap data agrometeorology pada website JASMAI yaitu website informasi data-data iklim/cuaca yang dikembangkan oleh *Japan Aerospace Exploration Agency* (JAXA) dan *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF).

Perwakilan dari Indonesia Intan Rahayu dan Takariyana Heni Astuti

"*Output* dari pertemuan ini, Kementerian Pertanian memiliki (1) hasil analisis bulanan mengenai situasi pertumbuhan tanaman dihubungkan dengan data dan informasi agrometeorologi citra satelit untuk komoditas padi yaitu laporan RGO dan komoditas jagung

yaitu laporan MGO; (2) laporan bulanan hasil analisis situasi pertumbuhan tanaman yang dihubungkan dengan data dan informasi agrometeorologi citra satelit untuk komoditas padi yaitu laporan RGO, dan komoditas jagung yaitu laporan MGO", jelas Takariyana Heni Astuti.

"Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Pusdatin akan berkoordinasi intensif dengan instansi terkait seperti lembaga riset atau penelitian komoditas tanaman pangan khususnya tanaman padi dan jagung untuk mendapatkan informasi secara lebih detail terkait fase pertumbuhan tanaman padi dan jagung di Indonesia", pungkas Intan Rahayu.
Penulis : Takariyana Heni Astuti

Pusdatin dan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Dukung Dinas Pertanian DI Yogyakarta dalam Pembaruan Data Lahan Baku Sawah

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Pertanian serta memastikan keakuratan informasi spasial sektor pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kementerian Pertanian, melaksanakan kegiatan pendampingan teknis pembaruan data Lahan Baku Sawah (LBS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 sampai 10 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan dan validitas data LBS nasional, yang menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari distribusi benih dan pupuk, hingga penentuan target produksi dan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Rapat Koordinasi dan Updating LBS dilakukan oleh tim gabungan dari Pusdatin dan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi DIY, dengan melibatkan pula seluruh penyuluh pertanian dari dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut meliputi sinkronisasi data spasial dan atribut LBS, verifikasi lapangan, serta pelatihan teknis penggunaan sistem informasi geospasial pertanian.

Rapat koordinasi dimulai dengan sambutan dari Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman Siti Rochayah Dwi Mulyani. Siti yang menyampaikan bahwa PPL Sleman agar dapat mengikuti dinamika terkait perubahan LBS. "Banyak wilayah LBS yang sudah berubah jadi pemukiman yang harus segera dicermati dan diupdate. Diharapkan tim Pusdatin dapat mendeliniasi lahan yang sudah mengalami perubahan agar luasan yang ditetapkan pusat sesuai atau mendekati kondisi riil lapangan", kata Siti.

Tim Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY sedang melakukan pengecekan LBS di Kabupaten Sleman.

"Melalui kegiatan ini, DPKP Provinsi DIY didorong untuk memperbarui data lahan sawah berdasarkan kondisi faktual di lapangan paling lambat tanggal 14 Oktober 2025. Hasil update LBS tersebut akan dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian ke Kementerian ATR/BPN untuk pemutakhiran LBS Nasional", ujar Ketua Kelompok Data Non Komoditas Pusdatin Mokh. Subehi.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan tim Pusdatin Heri Dwi Martono memberikan pelatihan digitasi untuk pemutakhiran LBS menggunakan aplikasi *field maps.* Pelatihan tersebut ditindaklanjuti dengan langsung melakukan *updating* LBS dimana data hasil

updating sudah dalam bentuk *polygon* yang tersimpan di web GIS.

Tim Pusdatin, Mokh Subehi (kiri) dan Heri Dwi Martono (kanan) memberikan pelatihan terkait updating LBS.

Dirjen Tanaman Pangan Yudi Sastro mengatakan, “Ketersediaan data lahan yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung kebijakan strategis nasional, seperti pengelolaan benih, pupuk, serta pengendalian alih fungsi lahan”. Lebih lanjut Yudi mengatakan bahwa dengan pembaruan data ini dapat dipastikan setiap program pembangunan pertanian benar-benar tepat sasaran.

Kegiatan pendampingan seperti ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan sistem data pertanian nasional. Pemutakhiran data LBS yang dilakukan secara periodik dan berbasis teknologi geospasial menjadi salah satu langkah strategis menuju pertanian modern yang didukung oleh data akurat dan terintegrasi.

Pusdatin, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola data pertanian nasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sinergitas bersama perlu dilakukan guna mendukung pencapaian kemandirian pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berdaya saing tinggi.

Penulis : Aulia Azhar

Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Tantangan yang Terus Dihadapi

Kemiskinan masih menjadi cerita panjang dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Meski negara ini terus berkembang, masih banyak warga yang hidup di bawah garis sejahtera. Pemerintah menyadari betul bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan yang rendah, tapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak secara multidimensional terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan selalu ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan dapat menimbulkan masalah lain baik ekonomi, sosial, dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Sejak 2013 hingga 2025, data menunjukkan tren yang menggembirakan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun dari 28,5 juta jiwa (11,47%) pada tahun 2013 menjadi sekitar 25,22 juta jiwa (8,39%) pada 2024. Penurunan ini tentu tak lepas dari berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah

Namun, perjalanan tersebut tidak selalu mulus. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi ujian berat bagi perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, usaha kecil terhenti, dan daya beli menurun drastis. Akibatnya, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 27,07 juta jiwa (10,19%).

Meski begitu, pemerintah bergerak cepat. Program bantuan sosial diperluas, bantuan tunai dan modal usaha digulirkan. Hasilnya mulai terlihat angka kemiskinan kembali menurun menjadi 26,82 juta jiwa (9,57%) pada 2022, kemudian 26,56 juta jiwa (9,36%) pada 2023, dan terus berkurang menjadi 25,22 juta jiwa (8,96%) pada 2024.

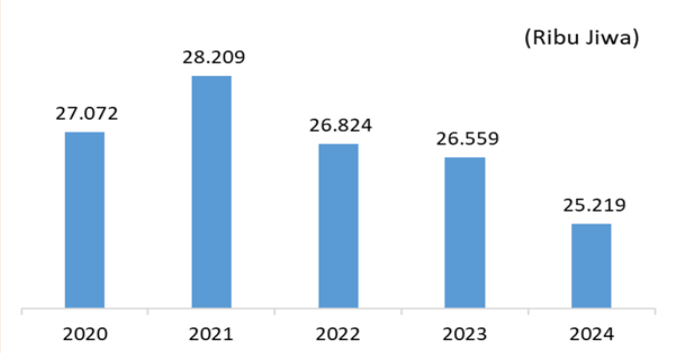

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 - 2024

Ketimpangan: PR yang Masih Tersisa

Meski angka kemiskinan menurun, persoalan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 12,22 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan 7,29 persen di perkotaan. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata.

Masyarakat kota cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, sementara penduduk desa masih banyak yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan harga dan cuaca.

Ketimpangan ini juga tercermin dari rasio gini, indikator yang mengukur kesenjangan pengeluaran antar penduduk. Sejak 2013, angka gini rasio Indonesia memang cenderung membaik, menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun pandemi sempat membalik tren itu pada 2020, gini rasio naik menjadi 0,384, menunjukkan ketimpangan yang memburuk.

Berangsur-angsur, situasi membaik dengan penurunan menjadi 0,381 pada 2022, meski sempat naik lagi ke 0,388 pada 2023. Hingga Maret 2025, gini rasio tercatat 0,375, angka terendah dalam lima tahun terakhir yang merupakan sebuah sinyal positif bahwa pemerataan kesejahteraan mulai membaik.

Gini Rasio Penduduk Indonesia Tahun 2020 - 2024

Tantangan ke Depan

Penurunan kemiskinan dan perbaikan distribusi pengeluaran adalah capaian penting, tapi perjuangan belum selesai. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat di perdesaan dan kelompok rentan.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus bergandengan tangan, bukan hanya untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Roch Widaningsih

Kenapa Semua Negara 'Ngotot' Soal Data Berkualitas?

Apakah pernah terlintas di benak anda mengapa pemerintah atau lembaga internasional bisa bikin keputusan besar seperti memberikan bantuan sosial, mengatur harga pangan, atau menentukan kebijakan publik strategis lainnya? Jawabannya: karena mereka punya data. Tapi ini data bukan sembarang data lho ya..

Sudah banyak negara di dunia kini yang semakin menyadari pentingnya data yang bagus, akurat, dan bisa dipercaya. Nah, itulah yang disebut dengan data berkualitas. Di zaman sekarang, data ini menjadi “bahan bakar” utama buat ngatur dunia, termasuk Indonesia.

Secara global, data itu ibarat kompas. Bayangkan anda sedang mengemudi mobil, tapi GPS-nya ngaco. Bisa-bisa kamu malah nyasar ke jalan *tol* yang belum selesai di ujungnya. Nah, begitu pula negara-negara di dunia. Mereka butuh data yang tepat biar bisa ambil keputusan yang benar.

Masih terpatri dalam ingatan kita semua, pada saat pandemi COVID-19 merebak beberapa tahun silam. Hanya negara yang punya data kesehatan yang akuratlah yang merespon dengan lebih cepat. Mereka bisa tahu di mana kasus melonjak, berapa yang sembuh, sampai bagaimana mengatur rumah sakit dan vaksin yang diperlukan. Kebayang kan kalau datanya ‘ngaco? Hadehhh..pasti bakalan chaos.. amburadul. Sederhananya kita akan diajak pada pertanyaan awal seperti ini: “seberapa besar kita bisa percaya pada data yang dimiliki”.

Ilustrasi pengambilan keputusan berdasarkan data berkualitas

Okey,..kita berilustrasi lagi nih ya. Pasti sering dong, mendengar berita atau laporan misalnya terkait jumlah petani, harga cabai, luas sawah, atau bahkan angka inflasi. Nah, semua angka dalam data itu hanya akan bermakna jika datanya benar, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang disebut data berkualitas: data yang akurat, konsisten, lengkap, dan tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan. Bayangkan kalau data yang kita pakai ternyata tidak akurat — misalnya, jumlah produksi padi di suatu daerah ternyata lebih kecil dari yang dilaporkan. Akibatnya, kebijakan yang dibuat bisa salah sasaran. Pemerintah bisa saja menyalurkan bantuan pupuk atau alat mesin pertanian dengan jumlah yang tidak sesuai. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa data bukan sekadar angka, tapi dasar dari setiap keputusan yang memengaruhi banyak orang. Semakin baik kualitas datanya, semakin tepat pula arah kebijakan yang diambil.

Di Indonesia, urusan data sering jadi pekerjaan rumah besar. Seringnya yang paling klasik nih, kita dihadapkan pada permasalahan data yang beda-beda antar instansi, formatnya beda, atau malah *‘nggak’* bisa diakses publik. Nah,.. makanya, pemerintah bikin kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Tujuan dari SDI ini *sebenernya* simpel. Intinya, semua data pemerintah harus rapi, seragam, dan bisa saling sambung. Jadi *‘nggak’* ada lagi tuh data tumpang tindih atau beda versi antar lembaga.

Di dalam SDI, ada empat “pemain utama”: **Produsen Data,** yaitu instansi yang *ngumpulin* data (misalnya kementerian atau lembaga). Selanjutnya, **Walidata**, yang punya tugas ngecek dan pastiin datanya *‘nggak”* salah. Lalu berikutnya, **Pembina Data,** yang bertugas memberikan rekomendasi dan tentu saja membina para penyelenggara SDI. Terakhir, Forum SDI yang bertugas menjadi “wasit” buat semua data supaya sesuai aturan.

Ini bukan sekadar proyek digitalisasi, komputerisasi, atau -sasi -sasi lainnya, ... akan tetapi sebuah sistem besar yang memastikan semua instansi pemerintah menggunakan “bahasa data” yang sama. SDI menekankan empat hal penting agar data bisa disebut berkualitas: pertama, harus mengikuti standar yang sama; kedua, wajib dilengkapi dengan metadata (semacam “identitas

data” yang menjelaskan asal-usul dan cara pengumpulannya); ketiga, harus menggunakan referensi data yang seragam seperti kode wilayah atau komoditas; dan keempat, dikelola dan dapat dibagipakaikan oleh instansi yang memang berwenang di bidangnya.

Kalau kita ibaratkan, SDI ini seperti dapur besar tempat semua instansi pemerintah memasak data. Setiap koki (instansi) harus mengikuti resep (standar data) yang sama, mencatat bahan dan prosesnya (metadata), serta menggunakan bahan baku dari sumber terpercaya (referensi data). Dengan begitu, hasil akhirnya — yaitu hidangan berupa informasi — bisa disajikan dengan rasa yang sama di mana pun kita mencicipinya. Jadi, data dari Kementerian dan Lembaga, serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya bisa saling cocok dan terhubung.

Dalam pandangan yang lebih luas, konsep umum kualitas data dan prinsip Satu Data Indonesia saling melengkapi. Kualitas data berbicara tentang “bagaimana data seharusnya”, sedangkan SDI berbicara tentang “bagaimana menjamin hal itu terjadi”. SDI memberikan kerangka kelembagaan dan aturan main yang memastikan semua pihak bermain di lapangan yang sama. Akibatnya, tidak ada lagi data ganda, format berbeda, atau istilah yang bikin bingung antara satu instansi dengan yang lain.

Pada akhirnya, benang merah antara keduanya sangat jelas: keduanya sama-sama berusaha memastikan bahwa data bisa dipercaya dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Kalau kualitas data ibarat fondasi rumah, maka Satu Data Indonesia adalah arsitekturnya — memastikan rumah itu kokoh, rapi, dan siap dihuni siapa saja. Dengan data yang berkualitas dan terintegrasi, pemerintah bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, masyarakat bisa mengakses informasi yang benar, dan bangsa ini bisa melangkah lebih mantap menuju era pembangunan berbasis data yang cerdas.

Kira-kira bisa *‘nggak’* kita menerapkannya ya?!! Jujur ya, memang sebenarnya jalan menuju data berkualitas *‘nggak’* akan selalu mulus. Masih banyak tantangan, mulai dari minimnya SDM yang paham data, sistem yang belum terhubung, sampai budaya kerja yang belum terbiasa dengan keterbukaan data. Tapi pelan-pelan dan pasti, juga dengan dukungan teknologi dan semangat kolaborasi, hal ini pasti bisa diperbaiki.

Melalui SDI, saat ini kita sedang berusaha *bikin* sistem data yang lebih rapi dan bisa diandalkan. Ibarat anak balita yang baru mau belajar jalan, perlu banyak di-“titah”. Jadi, yuk bersama dukung upaya ini, karena data bukan cuma buat ahli statistik atau urusan pemerintah saja, tapi buat kita semua.

Negara-negara di belahan dunia manapun yang paham akan data yang berkualitas, pasti akan berupaya segala cara untuk memilkinya. Jika sudah didapatkan, sudah sepatutnya untuk dijaga dan diperlakukan sebagai aset strategis yang sejajar dengan sumber daya lain seperti energi, pangan, dan keuangan.

Penulis : Apri Setiawan

Pusdatin Kementerian Pertanian Tingkatkan Kemampuan Deteksi Ancaman Siber Melalui Pelatihan SOC *Analyst Level* 1

Dalam rangka memperkuat pertahanan siber nasional di sektor pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian mengirimkan dua staf Tim Kerja Keamanan Siber, Muhammad Shafari Rahmat, S.Kom. dan Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom., untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Level I *Security Operation Center* (SOC) Analyst. Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini berlangsung pada 8-16 September 2025 di Bojongsari, Depok, dan diikuti oleh 29 peserta dari berbagai instansi pemerintah.

Foto Bersama Pelatihan dan Sertifikasi Level I Security Operation Center (SOC) Analyst beserta Kepala Pusbang SDM BSSN (tengah berseragam TNI) pada acara penutupan pelatihan (Depok, 16/09/2025)

PSOC sebagai ujung tombak keamanan siber merupakan pusat operasi yang bertugas memantau, menganalisis, dan menanggapi ancaman siber secara *real-time.* Layaknya "pos komando siber", SOC berfungsi mendeteksi serangan siber sejak dini, mencegah kebocoran data, dan memulihkan sistem dengan cepat ketika terjadi insiden. Dalam struktur SOC, terdapat tiga tingkatan *analyst* yang membentuk sistem pertahanan berlapis.

SOC *Analyst Level* 1 berperan sebagai garis depan yang melakukan pemantauan 24/7, analisis *alert* dasar, dan triase insiden. *Level* 2 bertanggung jawab untuk analisis insiden yang lebih mendalam dan respons terhadap ancaman yang kompleks. Sementara SOC *Analyst Level* 3 merupakan ahli yang melakukan investigasi lanjutan, *threat hunting,* dan mengembangkan strategi pertahanan untuk mengantisipasi ancaman masa depan.

Selama pelatihan intensif selama 49 jam pelajaran selama 5 hari kerja dengan satu jam pelajaran selama 45 menit, kedua staf Pusdatin Kementan bersama peserta lainnya memperdalam sembilan modul utama khusus untuk Level 1. Materi mencakup fundamental SOC *Analyst*, teknik deteksi kerentanan aset TI, pemantauan ancaman siber, analisis *log*, penanganan tiket insiden, hingga analisis dampak insiden keamanan siber. Metode pembelajaran yang komprehensif diterapkan, mulai dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus nyata, praktikum, hingga simulasi penanganan insiden siber.

Muhammad Shafari Rahmat, salah satu peserta dari Pusdatin Kementan, menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang sistem deteksi dini ancaman siber. "Pelatihan ini sangat relevan dengan tugas kami di Pusdatin. Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung menggunakan tools untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman siber. Kompetensi ini akan kami terapkan untuk memperkuat sistem keamanan data pertanian nasional," ujar Shafari.

Pelatihan yang difasilitasi oleh widyaiswara BSSN ini tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga etika profesi dan prosedur operasional standar dalam menangani insiden siber. Peserta berasal dari berbagai instansi termasuk Lembaga Kebijakan Pengadaan memperkuat sistem keamanan siber di Pusdatin Kementan, khususnya dalam melindungi data strategis pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional," tegas Evita.

Dengan kompetensi SOC Analyst Level 1 yang kini dimiliki kedua stafnya, Pusdatin Kementan siap berkontribusi lebih besar dalam sistem pertahanan siber nasional, sekaligus memastikan layanan data dan informasi pertanian tetap berjalan aman dan andal. Pelatihan ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks di era digital, sekaligus membentuk fondasi yang kuat untuk pengembangan kemampuan ke level SOC yang lebih tinggi di masa depan.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

SCAN ME

satudata.pertanian.go.id